

### **BAB III**

## **RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH**

Kondisi perekonomian Kabupaten Nagan Raya Tahun 2013 berikut karakteristiknya serta proyeksi perekonomian tahun 2013-2014 dapat digambarkan melalui Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah yang juga merupakan penjelasan atas analisis statistik Perekonomian Daerah. Bab ini juga membahas kinerja perekonomian daerah Kabupaten Nagan Raya berikut dinamika faktor eksternal dan internalnya.

Guna memperoleh gambaran kerangka ekonomi daerah tersebut, maka disusun berbagai prioritas pembangunan, pengambilan kebijakan untuk menghadapi tantangan dan penyelesaian masalah pembangunan agar arah pembangunan daerah Tahun 2015 dapat dicapai sesuai dengan sasaran program dan kegiatan yang ditetapkan. Pada sisi yang lain, perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial merupakan dasar kebijakan anggaran untuk mengalokasikan perencanaan anggaran berbasis kinerja secara efektif dan efisien.

#### **3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah**

Arah kebijakan ekonomi daerah disusun berdasarkan kajian internal dan eksternal serta berpedoman pada dokumen RPJMD 2013-2017. Untuk menjamin keberlanjutan arah pembangunan, arah kebijakan ekonomi Kabupaten Nagan Raya Tahun 2015 harus sejalan dengan kebijakan ekonomi nasional dan provinsi Tahun 2015. Berikut arah kebijakan ekonomi daerah Tahun 2015 yang mendasarkan pada perkembangan ekonomi daerah, nasional dan global serta tantangan yang masih akan dihadapi :

- a. Mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui koordinasi dan efektivitas kebijakan sektor riil. Pemilihan potensi komoditas unggulan sebagai basis pengembangan wilayah merupakan bagian terpenting dalam upaya meningkatkan daya saing daerah. Pemberdayaan ekonomi masyarakat

- khususnya dari UMKM akan terus dilakukan termasuk memberdayakan peranan koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan ini akan dilaksanakan dengan terus melakukan peningkatan sumberdaya manusia dalam hal manajerial maupun teknis untuk mendorong penguatan daya saing produk, fasilitasi kemudahan dalam akses permodalan bagi UMKM, fasilitasi promosi produk-produk industri dan promosi pariwisata untuk mendatangkan wisatawan baik wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara;
- b. Mendorong peningkatan pemerataan distribusi pendapatan melalui percepatan pertumbuhan ekonomi di pedesaan dan penciptaan keseimbangan pembangunan di setiap wilayah. Pengembangan kawasan-kawasan khusus seperti pengembangan kawasan agropolitan, pengembangan sentra-sentra produksi andalan pada sektor-sektor potensial, percepatan pembangunan pertanian melalui program revitalisasi pembangunan pertanian dan pembangunan perdesaan melalui peningkatan produksi pangan, peningkatan produktivitas pertanian dan pengembangan diversifikasi usaha di perdesaan, pemberdayaan ekonomi rakyat dan memperluas cakupan program pembangunan yang berbasis masyarakat, pengembangan produk unggulan (*core business* daerah) yang meliputi: agribisnis, industri kecil, dan pariwisata.
  - c. Meningkatkan investasi daerah yang mampu memperluas kesempatan kerja dan berusaha yang pada gilirannya mampu meningkatkan pendapatan perkapita. Kebijakan yang ditempuh antara lain melalui perbaikan iklim investasi yang kondusif bagi dunia usaha, baik skala usaha kecil, menengah maupun besar. Beberapa langkah yang ditempuh dalam menciptakan iklim investasi dan daya tarik investasi melalui penyediaan informasi potensi daerah, penyederhanaan perijinan dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu atap, membangun prasarana penunjang, melindungi kepastian hukum dan penyediaan tenaga kerja di daerah, meningkatkan produktivitas dan akses UMKM pada sumberdaya produktif serta mendorong perkembangan sektor-sektor ekonomi yang memberikan dampak multiplier yang tinggi terhadap pendapatan masyarakat.

- d. Mendorong peningkatan kemampuan perekonomian daerah untuk penciptaan lapangan kerja melalui peningkatkan keterampilan tenaga kerja, peningkatan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar, dan optimalisasi pemanfaatan dana program-program penanggulangan kemiskinan. Selain itu, untuk menjaga ketersediaan pangan dilakukan upaya peningkatan ketahanan pangan melalui pemberdayaan lumbung desa untuk mewujudkan desa mandiri pangan, dan diversifikasi pangan.
- e. Percepatan pembangunan sarana dan prasarana dilakukan untuk mendukung percepatan pembangunan ekonomi maupun peningkatan kualitas kehidupan masyarakat. Cakupan sarana dan prasarana dasar tersebut diarahkan untuk menyediakan sarana dan prasarana dasar di bidang kesehatan, pendidikan, sosial ekonomi masyarakat, pekerjaan umum, perhubungan dan irigasi. Selain itu, prasarana yang dibangun juga ditujukan untuk meningkatkan aksesibilitas guna memperlancar aliran investasi dan produksi untuk menciptakan keterkaitan ekonomi antar wilayah dengan tetap memperhatikan aspek berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Untuk menjamin keberlanjutan pertumbuhan ekonomi sebagaimana yang diharapkan maka perlu dilakukan perbaikan kualitas lingkungan melalui upaya pemantauan kualitas lingkungan dan rehabilitasi lahan serta penerapan sanksi bagi pelanggar masalah lingkungan.

### **3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2014 dan Perkiraan Tahun 2015**

Sektor pertanian merupakan tulang punggung perekonomian daerah di Provinsi Aceh. Demikian pula halnya di Kabupaten Nagan Raya. Bahkan proporsi sektor pertanian di kabupaten ini lebih besar dua kali lipat daripada sumbangan sektor pertanian pada perekonomian Provinsi Aceh. Sekitar 57,27 persen kegiatan ekonomi Kabupaten Nagan Raya disumbangkan oleh sektor primer ini. (Sumber ; *PDRB Kabupaten Nagan Raya Tahun 2013*)

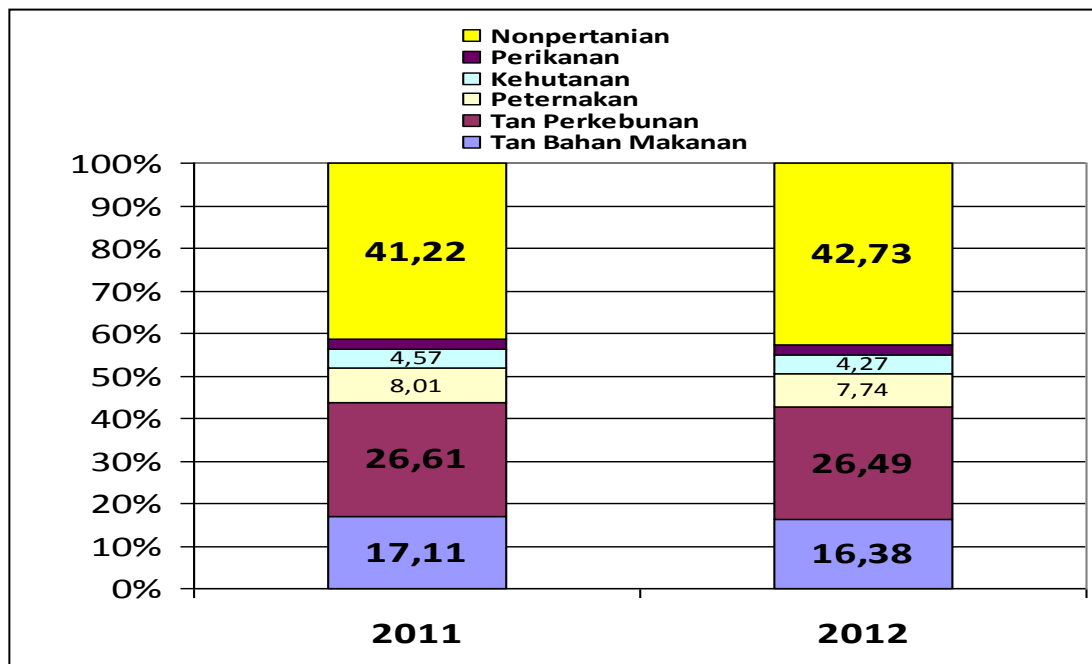
Meskipun berangsur menurun dalam beberapa tahun terakhir, peran sektor primer ini masih dominan di Kabupaten Nagan Raya. Subsektor tanaman perkebunan dan subsektor tanaman bahan makanan menjadi primadona

perekonomian daerah, karena keduanya masing-masing menyumbang 26,49 persen dan 16,38 persen terhadap kegiatan ekonomi daerah. (Sumber ; PDRB Kabupaten Nagan Raya Tahun 2013)

Sektor perdagangan, hotel dan restoran menyumbang 17,62 persen terhadap kegiatan ekonomi daerah. Sedangkan sektor bangunan dan sektor jasa masing-masing menyumbang 7,62 persen dan 5,93 persen.

Penduduk yang menggantungkan penghidupan pada mata pencaharian pertanian juga sangat besar, yakni 63.85 persen. Sektor lain yang menjadi sandaran utama kehidupan penduduk adalah sektor jasa dan sektor perdagangan yang masing-masing tercatat sebesar 16,49 persen dan 7,75 persen.

**Gambar.3.1**  
**Distribusi Persentase PDRB Sektor Pertanian dan Nonpertanian,**  
**Kabupaten Nagan Raya Tahun 2011-2012**



Sumber: PDRB Kabupaten Nagan Raya Tahun 2013

Beberapa komoditi pertanian penting yang dihasilkan daerah ini antara lain padi, kedelai, jagung, dan kacang tanah. Pada tahun 2012, kabupaten ini menghasilkan sekitar 96.670 ton padi yang dipanen dari lahan sawah seluas 16.744 ha. Kedelai juga merupakan tanaman pangan yang banyak dibudayakan petani, komoditi ini ditanam pada lahan seluas 818 ha dengan hasil produksi sebanyak

1.071 ton. Sedangkan jagung dan kacang tanah yang dihasilkan petani sebanyak 2.537 ton dan 1.694 ton.

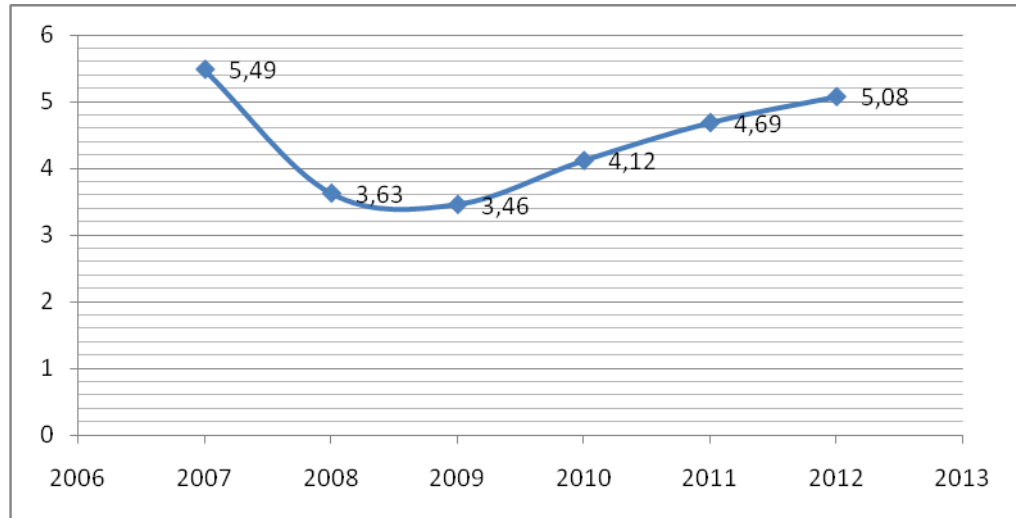
Komoditi perkebunan yang banyak dihasilkan daerah ini antara lain kelapa sawit dan karet. Luas lahan dan produksi karet yang dihasilkan perkebunan rakyat mencapai 10.870 ha dengan produksi 3.322 ton. Sementara produksi kelapa sawit yang dihasilkan perkebunan rakyat mencapai 141.561 ton dari lahan seluas 3.663 ha.

#### **a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**

PDRB Kabupaten Nagan Raya pada tahun 2012 menurut lapangan usaha atas harga berlaku sebesar Rp. 3.005.627,38,- yang didominasi pada urutan pertama yaitu sektor pertanian sebesar Rp. 1.721.389,26,- ; urutan ke dua sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran sebesar Rp. 529.635,84,- ; urutan ketiga sektor Jasa-jasa Rp. 178.304,29,- ; urutan keempat sektor Pengangkutan dan Komunikasi sebesar Rp.182.909,36,-. Pada tahun 2013 diperkirakan peringkat yang memberikan kontribusi terhadap PDRB tetap akan didominasi oleh keempat sektor tersebut. Hal tersebut juga terjadi pada PDRB Kabupaten Nagan Raya pada tahun 2011 yang dihitung atas dasar harga konstan.

Pasca gempa dan Tsunami yang melanda sebagian besar wilayah Aceh termasuk Nagan Raya, perekonomian Nagan Raya kembali bangkit meskipun masih mengalami fluktuasi, dengan tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 4,27 persen pada tahun 2006 dan 5,49 persen pada tahun 2007. Pertumbuhan ini tidak terlepas dari peran serta berbagai pihak dalam menanggulangi keadaan darurat pasca musibah baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Pada tahun 2008 pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan menjadi sebesar 3,63 persen dan menurun lagi menjadi 3,46 persen pada tahun 2009. Tanda-tanda peningkatan kembali terlihat pada tahun 2010 dengan angka pertumbuhan sebesar 4,12 persen. Pertumbuhan ini terus dilanjutkan dengan tingkat pertumbuhan yang semakin stabil di tahun 2011 dan tahun 2012, yaitu sebesar 4,69 persen menjadi 5,08 persen.

**Grafik 3.1**  
**Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Nagan Raya**  
**Tahun 2007 – 2012 (Persen)**



*Sumber ; PDRB Kabupaten Nagan Raya 2013*

Sektor Pertanian yang menjadi kunci penggerak perekonomian Nagan Raya dalam empat tahun terakhir ini mengalami percepatan pertumbuhan, setelah sebelumnya mengalami perlambatan. Pada tahun 2010 mengalami pertumbuhan sebesar 2,76 persen, pada tahun 2011 dan 2012 sebesar 3,20 persen dan 3,52 persen.

Sektor Pertambangan dan penggalian adalah sektor yang memiliki tingkat pertumbuhan tertinggi hingga tahun 2012 yaitu sebesar 19,32 persen. Selama enam tahun terakhir (tahun 2007 - 2012) pertumbuhan sektor ini terbilang sangat tinggi, yaitu di atas sepuluh persen. Hal ini menunjukkan bahwa sektor ini terus mengalami peningkatan yang sangat besar di wilayah ini. Selanjutnya Sektor Listrik dan Air Minum hingga tahun 2012 adalah sektor yang memiliki tingkat pertumbuhan tertinggi kedua yaitu sebesar 9,44 persen.

Sektor Pengangkutan dan Komunikasi memiliki tingkat pertumbuhan tertinggi ketiga, yaitu sebesar 8,54 persen. Sektor Bangunan memiliki tingkat pertumbuhan sebesar 7,88 persen. Sektor Industri pengolahan memiliki tingkat pertumbuhan sebesar 6,74 persen. Sektor Jasa-jasa memiliki pertumbuhan 6,03 persen. Sementara itu, Sektor Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan memiliki tingkat

pertumbuhan sebesar 4,85 persen dan sektor Perdagangan, hotel dan restoran memiliki tingkat pertumbuhan sebesar 4,47 persen.

#### **b. PDRB perkapita**

Pada tahun 2012 pendapatan per kapita penduduk Kabupaten Nagan Raya atas dasar harga berlaku tercatat sebesar Rp.20.482.533,- per tahun, atau mengalami peningkatan sebesar 5,68 persen dari tahun 2011 yang nilainya mencapai Rp.19.381.561,20-. Angka ini menggambarkan rata-rata pendapatan penduduk per jiwa selama setahun. Dengan perkiraan rata-rata anggota keluarga adalah 4 orang per keluarga, maka rata-rata pendapatan per keluarga dalam satu tahun adalah 77,64 juta rupiah atau 6,47 juta rupiah per bulan. Namun dalam realitasnya masih banyak terdapat keluarga yang berkategori kurang mampu yang berpendapatan tidak sebesar nilai tersebut. Sehingga hal ini mengindikasikan bahwa kesenjangan pendapatan masih terjadi di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu pengaturan distribusi kekayaan adalah faktor penting untuk mewujudkan pembangunan yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat.

Dapat disimpulkan bahwa Pendapatan per Kapita merupakan nilai rata-rata dari total pendapatan regional/daerah dibagi jumlah penduduk, yang belum tentu dinikmati oleh seluruh penduduk. Jika Pendapatan per Kapita suatu daerah semakin tinggi, namun kenyataan masih banyak penduduk yang berpenghasilan rendah, maka distribusi pendapatan penduduk wilayah tersebut masih belum merata.

Secara riil (tanpa dipengaruhi oleh fluktuasi harga/inflasi) pendapatan perkapita dapat dilihat dari Pendapatan Regional atas dasar harga konstan. Pendapatan per Kapita (atas dasar harga konstan 2000) penduduk Nagan Raya pada tahun 2012 yaitu Rp. 7.255.890,43- mengalami peningkatan sebesar 2,30 persen dibanding tahun 2011 yang hanya Rp. 7.092.492,65-.

#### **c. Laju Inflasi**

Indeks Harga Konsumen (IHK) merupakan salah satu indikator ekonomi yang sering digunakan untuk mengukur tingkat perubahan harga (inflasi/deflasi) di tingkat konsumen, khususnya di daerah perkotaan. Perubahan IHK dari waktu ke

waktu menunjukkan pergerakan harga dari paket komoditas yang dikonsumsi oleh rumah tangga. Di Indonesia, tingkat inflasi diukur dari persentase perubahan IHK dan diumumkan ke publik setiap awal bulan (hari kerja pertama) oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Mulai Januari 2014, pengukuran inflasi di Indonesia menggunakan IHK tahun dasar 2012=100. Ada beberapa perubahan yang mendasar dalam penghitungan IHK baru (2012=100) dibandingkan IHK lama (2007=100), khususnya mengenai cakupan kota, paket komoditas, dan diagramimbang. Perubahan tersebut didasarkan pada Survei Biaya Hidup (SBH) 2012 yang dilaksanakan oleh BPS, yang merupakan salah satu bahan dasar utama dalam penghitungan IHK. Hasil SBH 2012 sekaligus mencerminkan adanya perubahan pola konsumsi masyarakat dibandingkan dengan hasil SBH sebelumnya.

Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Nagan Raya sampai dengan saat ini belum melakukan perhitungan laju inflasi Kabupaten Nagan Raya, oleh karena itu laju inflasi di Kabupaten Nagan Raya menggunakan laju inflasi Kota Banda Aceh, Kota Lhok Seumawe, Kota Meulaboh dan Provinsi Aceh sebagai rujukan.

Pada bulan Mei 2014 di Kota Banda Aceh terjadi inflasi sebesar 0,86 persen, di Kota Lhokseumawe inflasi sebesar 1,16 persen dan Kota Meulaboh inflasi sebesar 0,42 persen sehingga secara agregat di Provinsi Aceh terjadi inflasi sebesar 0,80 persen. (*Sumber ; Berita Resmi Statistik No. 23/6/TH.XVII, 2 Juni 2014*)

Inflasi yang terjadi di Kota Banda Aceh secara umum disebabkan oleh kenaikan harga pada Kelompok Bahan Makanan dengan inflasi sebesar 3,91 persen, diikuti oleh Kelompok Sandang dengan inflasi sebesar 0,15 persen, Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar inflasi sebesar 0,13 persen, Kelompok Kesehatan dengan inflasi sebesar 0,08 persen, Kelompok Pendidikan, Rekreasi dan Olah Raga inflasi sebesar 0,05 persen. Sementara Kelompok Transpor, Komunikasi dan Jasa Keuangan mengalami deflasi sebesar 0,01 persen. Sedangkan Kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau tidak mengalami perubahan indeks.

Sumbangan kelompok pengeluaran terhadap inflasi menurut kota dapat disajikan dalam Tabel 3.1 berikut ini;



**Tabel 3.1**  
**Sumbangan Kelompok Pengeluaran terhadap Inflasi**  
**Menurut Kota (Bulan Mei 2014)**

Kelompok Pengeluaran	Banda Aceh (%)	Lhok Seumawe (%)	Meulaboh (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>U M U M</b>	<b>0,8609</b>	<b>1,1585</b>	<b>0,4123</b>
1. Bahan Makanan	0,8079	0,9067	-0,1439
2. Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau	0,0000	0,0851	0,0147
3. Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar	0,0387	0,0558	0,1854
4. Sandang	0,0095	0,0893	0,3367
5. Kesehatan	0,0033	-0,0025	0,0008
6. Pendidikan, Rekreasi, dan Olah Raga	0,0025	-0,0034	-0,0027
7. Transpor, Komunikasi dan Jasa Keuangan	-0,0010	0,0275	0,0213

**Sumber : Berita Resmi Statistik No. 23/6/TH.XVII, 2 Juni 2014**

Laju inflasi tahun kalender sampai dengan bulan Mei 2014 untuk Kota Banda Aceh adalah sebesar 1,58 persen, Kota Lhokseumawe 1,90 persen, Meulaboh 0,99 persen dan Aceh 1,47 persen. Inflasi “year on year” (Mei 2014 terhadap Mei 2013) untuk Kota Banda Aceh adalah sebesar 6,67 persen, Kota Lhokseumawe 5,27 persen, Meulaboh 6,51 persen dan Aceh 6,22 persen.

**Tabel 3.2**  
**Tingkat Laju Inflasi menurut Kota,**  
**Tahun Kalender 2014, dan Inflasi Year On Year menurut**  
**Kelompok Pengeluaran (2012=100)**

Kelompok Pengeluaran	Banda Aceh		Lhok Seumawe		Meulaboh	
	Laju Inflasi 2014	Inflasi Year On Year	Laju Inflasi 2014	Inflasi Year On Year	Laju Inflasi 2014	Inflasi Year On Year
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>U M U M</b>	<b>1,58</b>	<b>6,67</b>	<b>1,90</b>	<b>5,27</b>	<b>0,99</b>	<b>6,51</b>
1. Bahan Makanan	1,19	9,22	1,14	4,41	-6,72	-2,40
2. Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau	0,65	4,21	2,75	4,15	2,75	6,55
3. Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar	2,34	3,64	3,54	4,97	4,64	8,60
4. Sandang	1,38	4,83	1,60	6,57	6,40	15,16
5. Kesehatan	0,63	1,86	0,51	1,82	3,44	10,23
6. Pendidikan, Rekreasi, dan Olah Raga	1,96	7,00	0,61	3,74	3,54	6,48
7. Transpor, Komunikasi dan Jasa Keuangan	1,85	13,04	0,22	0,60	2,05	16,29

**Sumber : Berita Resmi Statistik No. 23/6/TH.XVII, 2 Juni 2014**

### **3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2014 dan Tahun 2015**

Melihat perkembangan perekonomian Kabupaten Nagan Raya tahun 2013-2014, proyeksi perekonomian tahun 2015, perekonomian Kabupaten Nagan Raya pada Tahun 2015 dan tahun-tahun berikutnya diperkirakan akan mengalami pertumbuhan yang positif.

Berdasarkan kondisi dan perkembangan perekonomian Kabupaten Nagan Raya serta mempertimbangkan kondisi lingkungan internal dan eksternal, maka tantangan dan prospek perekonomian daerah yang dihadapi pada Tahun 2014 dan 2015 adalah sebagai berikut :

#### **a. Tantangan Perekonomian Daerah Tahun 2014 dan Tahun 2015**

Diperkirakan perekonomian Kabupaten Nagan Raya masih akan dihadapkan pada sejumlah tantangan akibat pengaruh dari dinamika internal maupun lingkungan perekonomian global yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Beragam tantangan dimaksud perlu disikapi secara arif dan komprehensif serta dengan langkah-langkah yang lebih nyata. Tantangan dimaksud antara lain masih mencakup:

- 1) Percepatan pertumbuhan ekonomi akan terus diupayakan dengan mengembangkan pertumbuhan sektor-sektor ekonomi dominan. Pertumbuhan ekonomi dengan percepatan yang lebih tinggi, terjaganya stabilitas ekonomi makro, dan dengan pembenahan yang sungguh-sungguh pada sektor riil, diharapkan akan dapat mendorong peningkatan investasi dan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas dengan fokus utama untuk menurunkan tingkat pengangguran dan kemiskinan. Dalam hal ini diperlukan strategi kebijakan yang tepat dengan menempatkan prioritas pengembangan pada sektor-sektor yang mempunyai efek pengganda tinggi dalam menciptakan kesempatan kerja.
- 2) Menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif. Ini adalah tantangan cukup besar bagi pemerintah dewasa ini mengingat investasi merupakan salah satu penggerak kegiatan ekonomi daerah. Komitmen perbaikan iklim investasi tersebut telah dilakukan pemerintah dengan mengadakan perbaikan di bidang

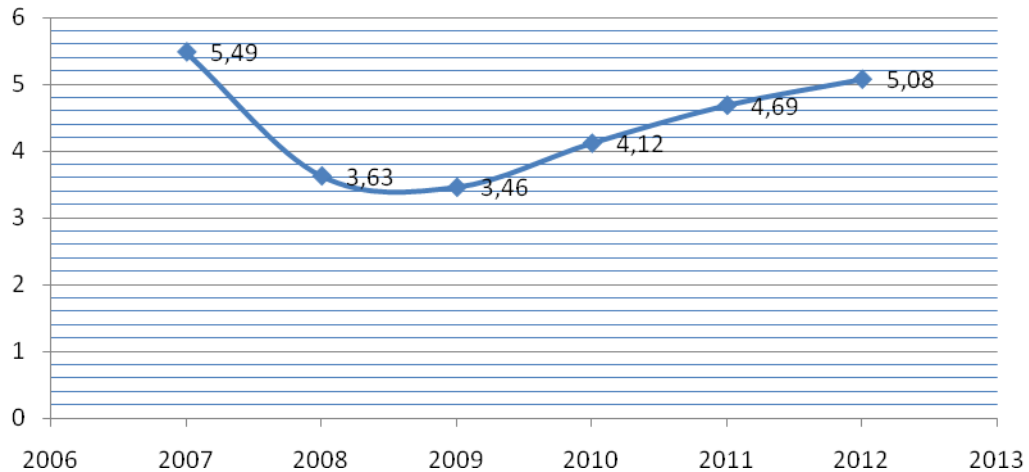
- peraturan perundang-undangan, pelayanan, dan penyederhanaan prosedur termasuk penyederhanaan birokrasi.
- 3) Menyediakan infrastruktur yang cukup dan berkualitas. Hal ini merupakan prasyarat agar dapat mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi dan berkelanjutan. Ketersediaan infrastruktur yang tidak memadai akan menjadi kendala bagi masuknya investasi. Selain itu infrastruktur sangat dibutuhkan karena mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Infrastruktur tersebut dapat menyokong banyak aspek ekonomi dan kegiatan sosial.
  - 4) Meningkatkan daya saing ekspor, untuk mencapai peningkatan pertumbuhan ekspor yang tinggi. Tingginya pertumbuhan ekspor diperlukan tidak saja sebagai penopang pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan juga untuk merangsang penciptaan lapangan kerja yang lebih luas dan bermutu.
  - 5) Meningkatkan partisipasi swasta melalui kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan swasta (*public-private partnership*). Tantangan ini menjadi cukup penting karena terbatasnya sumber daya pemerintah dalam pembiayaan pembangunan, terutama terkait dengan efisiensi pembiayaan investasi dan penyediaan infrastruktur yang bervariasi dan berkualitas.
  - 6) Membangun landasan yang lebih kuat untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pembangunan daerah tidak lagi dapat didasarkan pada pembangunan ekonomi semata, tetapi harus didasarkan pada pembangunan yang berkelanjutan dengan memnuhi kriteria ekonomis, bermanfaat secara sosial, didukung oleh kelembagaan yang memadai, dan menjaga kelestarian lingkungan hidup.

#### **b. Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2014 dan Tahun 2015**

Memperhatikan kondisi yang telah lalu dan sedang berkembang saat ini, maka perekonomian Kabupaten Nagas Raya diproyeksikan akan tetap dapat tumbuh relatif lebih baik dari tahun sebelumnya. Secara umum kondisi dan pertumbuhan ekonomi Nagas Raya akan mengalami perubahan apabila faktor-faktor produksi yang ada di masyarakat dapat di manfaatkan secara optimal.

Tanda-tanda peningkatan terlihat pada tahun 2011 dengan angka pertumbuhan sebesar 4,69 persen. Pertumbuhan ini terus dilanjutkan dengan tingkat pertumbuhan yang semakin stabil di tahun 2012, yaitu sebesar 5,08 persen.

**Grafik 3.2**  
**Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Nagan Raya**  
**Tahun 2007 – 2012 (Persen)**



**Sumber : PDRB Kabupaten Nagan Raya 2013**

Sektor Pertanian yang menjadi kunci penggerak perekonomian Nagan Raya dalam empat tahun terakhir ini mengalami percepatan pertumbuhan, setelah sebelumnya mengalami perlambatan. Pada tahun 2010 mengalami pertumbuhan sebesar 2,76 persen, pada tahun 2011 dan 2012 sebesar 3,20 persen dan 3,52 persen.

Sektor Pertambangan dan penggalian adalah sektor yang memiliki tingkat pertumbuhan tertinggi hingga tahun 2012 yaitu sebesar 19,32 persen. Selama enam tahun terakhir (tahun 2007 - 2012) pertumbuhan sektor ini terbilang sangat tinggi, yaitu di atas sepuluh persen. Hal ini menunjukkan bahwa sektor ini terus mengalami peningkatan yang sangat besar di wilayah ini. Selanjutnya Sektor Listrik dan Air Minum hingga tahun 2012 adalah sektor yang memiliki tingkat pertumbuhan tertinggi kedua yaitu sebesar 9,44 persen.

Sektor Pengangkutan dan Komunikasi memiliki tingkat pertumbuhan tertinggi ketiga, yaitu sebesar 8,54 persen. Sektor Bangunan memiliki tingkat pertumbuhan

sebesar 7,88 persen. Sektor Industri pengolahan memiliki tingkat pertumbuhan sebesar 6,74 persen. Sektor Jasa-jasa memiliki pertumbuhan 6,03 persen. Sementara itu, Sektor Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan memiliki tingkat pertumbuhan sebesar 4,85 persen dan sektor Perdagangan, hotel dan restoran memiliki tingkat pertumbuhan sebesar 4,47 persen.

### c. Sumber-Sumber Pertumbuhan Ekonomi

#### ➤ Peranan Sektor Strategis

Berdasarkan data yang ada, tidak dapat pungkiri sektor pertanian sampai dengan tahun 2011 merupakan sektor unggulan di Kabupaten Nagan Raya. Di dukung oleh luas lahan yang sangat memadai dan perkembangan teknologi pertanian yang semakin memasyarakat, maka sektor ini ke depan masih dapat memberikan peran penting terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Dengan dukungan dan komitmen semua pemangku kepentingan secara konsisten maka peran sektor pertanian dapat diperluas untuk mendukung berkembangnya industri pengolahan yang berbasis produk pertanian. Pengembangan ke arah industri akan memberikan peningkatan nilai tambah bagi masyarakat yang akhirnya juga akan berpengaruh kepada pertumbuhan ekonomi.

Dukungan lain untuk mengoptimalkan peran sektor pertanian dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah dilakukannya upaya perbaikan melalui revitalisasi pertanian. Revitalisasi pertanian dimaksudkan sebagai kesadaran untuk menempatkan kembali arti penting sektor pertanian secara proporsional dan kontekstual. Dalam arti menyegarkan kembali vitalitas, memberdayakan kemampuan petani, dan meningkatkan kinerja pertanian dalam pembangunan daerah, dengan tidak menngabaikan sektor lainnya.

Revitalisasi tidak dilakukan dengan pola-pola terpusat yang sentralistik dan orientasi proyek, akan tetapi berupa penggalangan komitmen dan kerja sama seluruh pemangku kepentingan dan merubah

paradigma pola pikir masyarakat untuk melihat pertanian tidak hanya urusan bercocok tanam yang sekedar menghasilkan komoditas untuk dikonsumsi.

➤ **Peranan Investasi Bagi Pembangunan Daerah**

Investasi swasta dirasakan semakin penting mengingat kapasitas fiskal Pemerintah Kabupaten Nagas Raya yang terbatas, sehingga sulit untuk selalu dijadikan sebagai sumber utama pertumbuhan ekonomi daerah. Dampak pengganda yang diciptakan dari peningkatan investasi adalah meningkatkan pemanfaatan sumberdaya secara optimal dalam kegiatan produksi, berkembangnya kegiatan perdagangan antar daerah, dan terciptanya nilai tambah yang lebih besar. Investasi juga mendorong percepatan perkembangan teknologi informasi, telekomunikasi, dan transportasi. Percepatan ini akan memberikan kesempatan yang lebih besar mobilitas sumberdaya (bahan mentah, barang modal, dan tenaga kerja) secara mudah dan murah. Percepatan ini juga bermanfaat bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat.

➤ **APBD Sebagai Instrumen Pertumbuhan**

Sebagai instrumen pertumbuhan ekonomi daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus dikelola dengan sebaik-baiknya. Pengelolaan APBD dapat mempertimbangkan fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi secara efektif dan efisien dalam membiayai pembangunan daerah. Dari fungsi alokasi belanja daerah dilakukan untuk menyediakan barang publik dan pelayanan publik yang dibutuhkan oleh masyarakat yang tidak dapat disediakan sendiri oleh masyarakat. Selain itu belanja daerah juga dapat dialokasikan dalam kerangka investasi. Investasi yang dilakukan harus pada sektor-sektor prioritas yang dimiliki daerah sehingga diharapkan dapat menggerakkan perekonomian daerah, menciptakan lapangan kerja baru, dan akhirnya dapat memperbaiki pendapatan masyarakat. Sektor prioritas yang dimaksud adalah sektor

infrastruktur dan sektor-sektor yang mampu memberikan nilai tambah dan output yang cukup tinggi bagi perekonomian serta dapat menyerap tenaga kerja yang cukup banyak. Selain itu investasi belanja daerah juga diharapkan dapat dialokasikan pada hal-hal yang dapat mendorong kinerja sektor riil, seperti perbaikan sistem pelayanan, infrastruktur, pelatihan keterampilan tenaga kerja, penyediaan dana stimulan, pemberian modal usaha dan bantuan teknis.

### **3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah Kabupaten Nagan Raya.**

Kabupaten Nagan Raya dalam hal pengelolaan keuangan daerah telah menerapkan pola pengelolaan keuangan berbasis kinerja sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang laporan keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan berfungsi optimal bila penyelenggaraan urusan pemerintahan didukung dengan sumber-sumber penerimaan yang cukup berdasarkan peraturan perundang – undangan (*money follow function*). Analisis keuangan daerah pada prinsipnya dimanfaatkan untuk memberikan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah.

Menganalisa pengelolaan keuangan daerah dan kerangka pendanaan harus memahami jenis obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan sesuai dengan kewenangan serta struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Oleh sebab itu sebelum penentuan arah Kebijakan Umum Pendapatan dan Belanja Daerah untuk mendukung pembangunan Kabupaten Nagan Raya lima tahunan melalui rencana keuangan tahun dapat dijelaskan sebagaimana berikut :

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam negeri nomor 21 tahun 2011 tentang Pendanaan



Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah meliputi : a) Pendapatan Daerah; b) Belanja Daerah; c) Pembiayaan Daerah.

Dari struktur APBD tersebut untuk dapat menilai kinerja pelaksanaan APBD dilakukan dengan menganalisa dari masing – masing susunan/ struktur APBD dimaksud dan perkembangan Neraca Daerah.

Menyadari akan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang relatif kecil, maka Pemerintah Kabupaten Nagan Raya akan mengoptimalkan penerapan pola intensifikasi maupun ekstensifikasi terhadap sumber-sumber pendapatan. Demikian pula terhadap sumber-sumber pendapatan yang bersumber dari pemerintah atasan maupun pusat telah dimanfaatkan sebagai motorisator pembangunan yang diharapkan mampu meningkatkan pelaksanaan pembangunan daerah.

Dalam upaya meningkatkan pelaksanaan pembangunan diberbagai bidang, stabilitas perekonomian adalah merupakan salah satu prasyarat dasar untuk tercapainya peningkatan kesejahteraan rakyat melalui pertumbuhan yang tinggi dan peningkatan kualitas pertumbuhan, serta dapat memberikan kepastian berusaha bagi para pelaku ekonomi, oleh karenanya stabilitas ekonomi makro akan dapat dicapai apabila hubungan variabel ekonomi makro yang utama berada dalam keseimbangan, neraca pembayaran, penerimaan dan pengeluaran fiskal, serta tabungan dan investasi Perekonomian yang tidak stabil akan dapat menimbulkan biaya yang tinggi bagi perekonomian dan akan menyulitkan masyarakat, baik swasta maupun rumah tangga.

Tingkat investasi yang rendah akan menurunkan potensi pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan adanya fluktuasi yang tinggi dalam pertumbuhan produksi, hal ini sangat berpengaruh terhadap tenaga kerja menganggur.

Inflasi yang tinggi akan merupakan beban yang sangat berat dan sangat dirasakan oleh penduduk miskin, dimana daya beli masyarakat akan semakin rendah. Kebijakan keuangan diarahkan pada :

- a. Menyeimbangkan antara peningkatan alokasi anggaran dengan upaya untuk memantapkan kesinambungan anggaran melalui peningkatan penerimaan

- daerah untuk dapat menaikkan belanja daerah, dengan harapan penurunan defisit anggaran secara bertahap;
- b. Peningkatan penerimaan daerah terutama ditempuh melalui reformasi kebijakan dan administrasi perpajakan dan sumber-sumber penerimaan daerah yang sah lainnya;
  - c. Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengeluaran daerah ditempuh melalui penajaman pengalokasian anggaran agar lebih terarah dan tepat sasaran.

### **3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah.**

Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, menambah akuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.

Kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Nagan Raya sejak lima tahun yang lalu, selain mengacu pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, juga mengacu pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, berkenaan dengan Pasal 179 ayat (1) dan ayat (2). Berdasarkan pasal dan ayat tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Nagan Raya memiliki sumber-sumber pendapatan daerah yang terdiri atas:

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain – lain pendapatan asli daerah yang sah.
- 2) Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.
- 3) Lain – lain Pendapatan Daerah yang sah yang terdiri dari Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi kepada Kabupaten/ Kota, Dana Penyesuaian dan Dana Otonomi Khusus dan bantuan keuangan dari Provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya, dan

**a. Pendapatan Asli Daerah**

Terkait dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pasal 180 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006, menjelaskan bahwa sumber PAD terdiri atas ; 1) Pajak Daerah; 2) Retribusi Daerah; 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Hasil Penyertaan Modal 4) Zakat; dan 5) Lain-lain PAD yang Sah.

Untuk mewujudkan peningkatan Pendapatan Daerah di Kabupaten Nagan Raya, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan manajemen tata-kelola pemungutan dan penerimaan Pendapatan Daerah sesuai dengan mekanisme dan standar baku;
- 2) Meningkatkan Pendapatan Daerah melalui perluasan obyek dan intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara optimal;
- 3) Pendayagunaan asset daerah;
- 4) Mengadakan peninjauan kembali (*annual-review*) atas berbagai Peraturan Daerah yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman.

**Tabel 3.4**  
**Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Asli Daerah (PAD)**  
**Kabupaten Nagan Raya Tahun 2010 s/d 2015**

No.	URAIAN	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	Proyeksi/Target Rencana 2014	Proyeksi/Target Rencana 2015
I.1	<b>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b>	11.006.703.491,03	15.992.400.727,22	27.689.044.993,97	37.942.005.577,87	46.675.208.575,00	44.247.961.697,00
I.1.1	Pajak Daerah	3.223.411.903,00	4.436.731.214,00	5.177.766.976,00	5.866.374.609,00	10.128.000.000,00	10.128.000.000,00
I.1.2	Retribusi Daerah	1.373.144.450,00	1.285.234.382,00	13.341.075.324,00	1.574.093.193,00	7.254.996.700,00	8.164.698.270,00
I.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	1.044.151.819,00	927.037.503,22	1.185.629.805,97	1.590.826.387,67	1.700.000.000,00	1.700.000.000,00
I.1.4	Lain2 PAD	5.365.995.319,03	5.488.488.755,00	4.534.572.888,00	25.390.685.467,20	23.592.211.875,00	20.255.263.427,00
I.1.5	Zakat/infak/sadaqah	-	3.854.908.873,00	3.450.000.000,00	3.520.025.921,00	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00

**Sumber : DPPKAD Kabupaten Nagan Raya**

PAD kabupaten Nagan Raya dari tahun 2010 – 2013 mengalami peningkatan rata-rata pertahunnya 36,19%, dimana PAD terbesar terjadi pada Tahun 2011 yaitu

Rp. 15.992.400.727,22 atau sebesar 45,30% terhadap tahun 2010 yang hanya sebesar Rp. 11.006.703.491,03.

Untuk Tahun 2014, proyeksi/target PAD Kabupaten Nagan Raya ditetapkan sebesar Rp. 46.675.208.575,- atau peningkatan sebesar 23,02% dari tahun 2013 yang sebesar Rp. 37.942.005.577,87. Sedangkan untuk tahun 2015, proyeksi/target PAD Kabupaten Nagan Raya ditetapkan sebesar Rp. 44.247.961.697,-.

**Tabel 3.5**  
**Realisasi Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD)**  
**Kabupaten Nagan Raya Tahun 2010 – 2013**

No.	URAIAN	Pertumbuhan (%)				Pertumbuhan Rerata (%)
		2010	2011	2012	2013	
<b>I.1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b>	<b>(10,72)</b>	<b>45,30</b>	<b>73,14</b>	<b>37,03</b>	<b>36,19</b>
I.1.1	Pajak Daerah	9,85	37,64	16,70	13,30	19,37
I.1.2	Retribusi Daerah	(24,41)	(6,40)	938,03	(88,20)	204,75
I.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	8,35	(11,22)	27,89	34,18	14,80
I.1.4	Lain2 PAD	(18,86)	2,28	(17,38)	459,94	106,49
I.1.5	Zakat/infak/sadaqah	-	-	(10,50)	2,03	(2,12)

*Sumber ; Olahan Tabel 3.4*

#### **b. Dana Perimbangan**

Dana perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam), Dana Alokasi Umum (DAU) , dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Realisasi Dana perimbangan dari tahun 2011 s/d 2013 mengalami kenaikan rata-rata pertahun sebesar 15,54 % yang didominasi Dana Alokasi Umum (DAU).

**Tabel 3.6**  
**Realisasi dan Proyeksi/Target Dana Perimbangan**  
**Kabupaten Nagan Raya Tahun 2010-2015**

No.	URAIAN	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	Proyeksi/Target Rencana 2014	Proyeksi/Target Rencana 2015
I.2	Dana Perimbangan	364.257.187.335,00	401.775.941.987,00	464.268.751.682,00	560.709.513.544,00	629.313.268.919,00	641.728.837.780,00
I.2.1	Bagi Hasil Pajak	28.708.790.638,00	27.223.815.249,00	28.593.322.339,00	25.024.494.362,67	35.875.125.279,33	35.875.125.279,33
I.2.2	Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)	14.591.424.697,00	11.746.121.738,00	11.214.078.343,00	12.512.247.181,33	17.937.562.639,67	17.937.562.639,67
I.2.3	Dana Alokasi Umum	291.226.672.000,00	330.987.205.000,00	396.983.251.000,00	464.191.402.000,00	500.941.291.000,00	500.941.291.000,00
I.2.4	Dana Alokasi Khusus	29.730.300.000,00	31.818.800.000,00	27.478.100.000,00	58.981.370.000,00	74.559.290.000,00	74.559.290.000,00

**Sumber : DPPKAD Kabupaten Nagan Raya**

➤ **Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak**

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, menjelaskan bahwa dana Bagi Hasil yang bersumber dari pajak terdiri atas : 1) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); 2) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); dan 3) Pajak Penghasilan (PPh).

Sedangkan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari sumberdaya alam berasal dari : 1) Kehutanan; 2) Pertambangan; 3) Perikanan; 4) Pertambangan Minyak Bumi; 5) Pertambangan Gas Bumi; dan 6) Pertambangan Panas Bumi.

Dana bagi hasil Pajak pada tahun 2012 sebesar Rp. 28.593.322.339,- artinya mengalami peningkatan sebesar 5,03% dibandingkan anggaran tahun 2011. Sedangkan pada tahun 2013, realisasi penerimaan dana bagi hasil pajak yaitu sebesar Rp. 25.024.494.326,67 atau mengalami penurunan sebesar 12,48% dibandingkan anggaran tahun 2012.

Untuk tahun 2014, penerimaan dari Dana bagi Hasil Pajak diproyeksikan hingga Rp. 35.875.125.279,33- atau meningkat 43,36% dari Realisasi penerimaan tahun 2013.

Dana bagi hasil bukan pajak pada tahun 2012 sebesar Rp. 11.214.078.343,- artinya mengalami penurunan sebesar 4,53% dibandingkan anggaran tahun 2011. Sedangkan pada tahun 2013, realisasi penerimaan dana bagi hasil bukan pajak yaitu sebesar Rp. 12.512.247.181,33 atau mengalami peningkatan sebesar 11,58% dibandingkan anggaran tahun 2012.

Untuk tahun 2014, penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak diproyeksikan hingga Rp. 17.937.562.639,67- atau meningkat 43,36% dari Realisasi penerimaan tahun 2013.

Sedangkan Untuk tahun 2015, penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak diproyeksikan hingga Rp. 66.228.256.780, -.

➤ **Dana Alokasi Umum (DAU)**

Dana perimbangan yang diperoleh dari Dana Alokasi Umum (DAU) sejak tahun 2010 hingga 2013 meningkat rata-rata sebesar 16,84%. Di tahun 2013, Realisasi DAU yang diterima sebesar Rp. 464.191.402.000,- atau meningkat sebesar 16,93% dari tahun 2012 yang hanya sebesar Rp. 396.983.251.000,-.

Untuk tahun 2014, diproyeksikan DAU sebesar Rp. 500.941.291.000,- atau meningkat sebesar 7,92% dari realisasi tahun 2013. Sedangkan untuk tahun 2015, diproyeksikan DAU sama dengan proyeksi tahun 2014 yaitu sebesar Rp. 500.941.291.000,-.

➤ **Dana Alokasi Khusus (DAK)**

Adapun komponen dana perimbangan lainnya, yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK) sejak tahun 2010 hingga 2013 mengalami peningkatan rata-rata pertahunnya sebesar 36,01%. Di Tahun 2013, realisasi DAK sebesar Rp. 58.981.370.000,- atau meningkat sebesar 114,65% dari tahun 2012 yang realisasi penerimaannya hanya sebesar Rp. 27.478.100.000,-.

Untuk tahun 2014, Penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) diproyeksikan sebesar Rp. 74.559.290.000,- atau meningkat sebesar 26,41% dari realisasi tahun 2013 yang hanya Rp. 58.981.370.000,-. Sedangkan untuk tahun 2015, Penerimaan

Dana Alokasi Khusus (DAK) diproyeksikan sama dengan Proyeksi tahun 2014 yaitu sebesar Rp. 74.559.290.000

**Tabel 3.7**  
**Pertumbuhan rata-rata Penerimaan Dana Perimbangan**  
**Kabupaten Nagan Raya (2010 – 2013)**

No.	URAIAN	Tahun			Pertumbuh an Rerata (%)
		2011	2012	2013	
<b>I.2</b>	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>10,30</b>	<b>15,55</b>	<b>20,77</b>	<b>15,54</b>
I.2.1	Bagi Hasil Pajak	(5,17)	5,03	(12,48)	-4,21
I.2.2	Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)	(19,50)	(4,53)	11,58	-4,15
I.2.3	Dana Alokasi Umum	13,65	19,94	16,93	16,84
I.2.4	Dana Alokasi Khusus	7,02	(13,64)	114,65	36,01

*Sumber :Olahan Tabel 3.6*

**c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah**

Realisasi dan proyeksi/target Pendapatan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Kabupaten Nagan Raya dari Tahun 2011 – 2015 dapat dilihat pada Tabel 3.8 dibawah ini.

**Tabel 3.8**  
**Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Penerimaan**  
**Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Kabupaten Nagan Raya**  
**Tahun 2011 s/d 2015**

No.	URAIAN	Tahun				
		2011	2012	2013	Proyeksi/Target Rencana 2014	Proyeksi/Target Rencana 2015
<b>I.3</b>	<b>Lain2 Pendapatan Daerah yang Sah</b>	74.168.315.605,00	35.552.990.529,47	41.011.451.680,12	220.355.718.204,00	220.367.396.221,00
I.3.1	Pendapatan Hibah	1.612.858.632,00	626.280.000,00	-	-	-
I.3.2	Dana Darurat	-	-	540.000.000,00	-	-
I.3.3	Bantuan Dana Kontigensi	-	1.072.801.000,00	-	-	-
I.3.4	Dana Bagi Hasil Pajak dari prov. Dan Pemerintah daerah lainnya	10.337.285.301,00	11.492.569.369,47	11.800.074.680,12	15.036.349.708,00	15.036.349.708,00
I.3.5	Bantuan Keuangan dari Prov	1.713.385.632,00	15.836.340.160,00	-	145.833.596.496,00	145.845.274.513,00
I.3.6	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	60.504.786.040,00	6.525.000.000,00	28.671.377.000,00	59.485.772.000,00	59.485.772.000,00

*Sumber : DPPKAD Kabupaten Nagan Raya*

Dana Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah rata-rata meningkat sebesar 46,84 persen.

Kontribusi masing-masing sumber pendapatan daerah Kabupaten Nagan Raya selama lima tahun yang lalu, rata-rata masih didominasi oleh Dana Perimbangan, teristimewa dari jenis Dana Alokasi Umum (DAU). Ini mengindikasikan bahwa Pendapatan Daerah Kabupaten Nagan Raya masih sangat tergantung pada peranan pusat melalui Dana Perimbangan.

Pemerintah Kabupaten Nagan Raya sudah sejak awal telah menempuh berbagai kebijakan dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah baik melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi. Penyempurnaan qanun menyangkut dengan objek dan tarif, serta pengembangan objek-objek pajak dan retribusi sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang terus diupayakan setiap tahunnya. Begitu pula kebijakan-kebijakan berkenaan dengan keuangan daerah ditempuh semaksimal mungkin, baik peningkatan jumlah anggaran, pengelolaan anggaran dan prioritas anggaran. Atas dasar ini, maka Pemerintah Kabupaten Nagan Raya menempuh kebijaksanaan untuk menetapkan pertumbuhan pendapatan daerah yang dinilai lebih tepat.

**Tabel 3.9**  
**Tingkat Pertumbuhan Rata-rata Pendapatan Daerah**  
**Kabupaten Nagan Raya Tahun 2009-2013**  
**yang Dinilai Relatif Tepat dan Wajar**

<b>No.</b>	<b>Uraian</b>	<b>Pertumbuhan Rata-rata (2009 – 2013) (%)*</b>	<b>Pertumbuhan yang Relatif Tepat dan Wajar (%)**</b>
<b>1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>36,19</b>	10,10
1.1	Pajak Daerah	19,37	15,00
1.2	Retribusi Daerah	204,75	5,00
1.3	Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang Dipisahkan	14,80	5,00
1.4	Zakat	-2,12	-



	1.5	Lain-lain PAD yang Sah	106,49	5,00
<b>2</b>	<b>Dana Perimbangan</b>		<b>9,34</b>	10,00
	2.1	Dana Bagi Hasil Pajak	-3,06	5,00
	2.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)	16,62	5,00
	2.3	Dana Alokasi Umum	10,09	10,0
	2.4	Dana Alokasi Khusus	20,34	5,0
<b>3</b>	<b>Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>		<b>60,31</b>	10,00
	3.1	Hibah	39,65	-
	3.2	Dana Darurat	-	
	3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	8,31	10,00
	3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	174,43	-
	3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	181,07	-
	3.6	Pendapatan Lainnya	-	-
<b>Pert. Rata-rata Pendapatan (%)</b>			<b>11,19</b>	<b>10,00</b>

*Sumber : RPJM Kabupaten Tahun 2012-2017*

### 3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Berkaitan dengan kondisi pendapatan sebagaimana diuraikan di atas dan dikaitkan dengan permasalahan/isu yang dihadapi maka kebijakan-kebijakan belanja daerah masih diarahkan sebagai berikut :

- a. Belanja daerah yang bersifat tetap dan mengikat seperti belanja pegawai menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan.
- b. Belanja daerah berupa hibah dan bantuan sosial diberikan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan

- kemampuan keuangan daerah serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Belanja bagi hasil pada pemerintahan desa merupakan bentuk distribusi fiskal yang ditentukan berdasarkan proporsi besaran pendapatan asli daerah (pajak daerah dan retribusi daerah) dan dana perimbangan (DAU yang telah dikurangi oleh belanja pegawai), sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
  - d. Belanja tidak terduga diarahkan untuk menyediakan anggaran siaga (*standby budget*) terutama disiapkan untuk antisipasi dan penanganan bencana alam maupun sosial.
  - e. Belanja daerah berupa belanja langsung setiap SKPK diarahkan untuk mendukung operasional dan peningkatan kinerja SKPK sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang melekat.
  - f. Belanja daerah berupa belanja langsung urusan wajib dan pilihan digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan dan pemulihan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak. Belanja langsung program diutamakan untuk membiayai prioritas pembangunan Tahun 2014.
  - g. Mendukung program/kegiatan strategis yang terkait dengan agenda provinsi dan nasional, dengan tetap memprioritaskan pembangunan daerah serta memiliki skala pelayanan regional maupun nasional.

Adapun realisasi belanja daerah Kabupaten Nagan Raya tahun 2009 -2013 dapat dilihat pada tabel 3.10 berikut ini

**Tabel 3-10**  
**Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2009 - 2013**  
**(Dalam Rupiah)**

No	Uraian	Realisasi Belanja Daerah (Rp)				
		2009	2010	2011	2012	2013
<b>1</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>215.151.617.604,00</b>	<b>257.989.012.324,00</b>	<b>274.757.587.837,00</b>	<b>285.543.921.397,00</b>	<b>294.418.975.794,00</b>
1.1	Belanja Pegawai	175.811.472.129,00	215.865.284.539,00	227.173.642.497,00	245.856.444.356,00	274.329.565.227,00
1.2	Belanja Bunga	-	-	-	-	-
1.3	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-
1.4	Belanja Hibah	12.260.940.500,00	15.282.229.000,00	24.875.380.000,00	12.107.122.820,00	400.340.000,00
1.5	Belanja Bantuan Sosial	2.469.867.600,00	1.715.695.625,00	6.129.495.990,00	822.400.000,00	16.146.850.000,00
1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi /Kab/ Pemerintahan Desa	160.000.000,00	476.769.160,00	325.740.750,00	120.340.086,00	3.542.220.567,00
1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kab/ Pemerintahan Desa	24.449.337.375,00	24.649.034.000,00	16.253.328.600,00	26.637.614.135,00	-
1.8	Belanja Tidak Terduga	-	-	-	-	-
<b>2</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>185.350.491.914,00</b>	<b>165.557.143.865,00</b>	<b>228.591.069.913,00</b>	<b>245.968.447.290,00</b>	<b>327.934.750.904,00</b>
2.1	Belanja Pegawai	29.548.273.432,00	28.349.857.979,00	47.488.883.870,00	62.342.794.875,00	58.829.494.754,00
2.2	Belanja Barang dan Jasa	70.859.782.237,00	59.693.772.365,00	72.417.201.395,00	88.137.523.138,00	115.236.953.932,00
2.3	Belanja Modal	84.942.436.245,00	77.513.513.521,00	108.684.984.648,00	95.488.129.277,00	153.868.302.218,00
	<b>TOTAL BELANJA</b>	<b>400.502.109.518,00</b>	<b>423.546.156.189,00</b>	<b>503.348.657.750,00</b>	<b>531.512.368.687,00</b>	<b>622.353.726.698,00</b>
	<b>TOTAL PENDAPATAN</b>	<b>429.931.769.661,00</b>	<b>396.821.732.177,03</b>	<b>491.936.658.319,22</b>	<b>527.510.787.205,44</b>	<b>639.662.970.801,99</b>
	<b>SURPLUS/DEFISIT</b>	<b>29.429.660.143,00</b>	<b>(26.724.424.011,97)</b>	<b>(11.411.999.430,78)</b>	<b>(4.001.581.481,56)</b>	<b>17.309.244.103,99</b>

Sumber : DPPKAD Kabupaten Nagan Raya

**Tabel 3-11**  
**Realisasi dan Perkiraan Belanja Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012 - 2017**  
**(Dalam Rupiah)**

No	Uraian	Tahun					
		2012	2013	2014*	2015**	2016**	2017**
1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>317.471.032.630</b>	<b>331.022.673.272</b>	<b>390.292.649.495</b>	<b>307.049.028.574</b>	<b>306.321.026.910</b>	<b>302.855.961.412</b>
2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>273.963.411.161</b>	<b>334.579.800.737</b>	<b>540.785.334.443</b>	<b>375.282.146.035</b>	<b>404.803.428.968</b>	<b>515.673.664.026</b>
	2.1 Belanja Pegawai	66.154.632.950	63.487.617.450	69.744.157.000	65.844.958.350	79.045.767.432	93.557.936.188
	2.2 Belanja Barang dan Jasa	103.833.753.571	117.432.146.275	152.874.138.470	138.854.394.033	167.505.303.008	201.112.728.970
	2.3 Belanja Modal	103.975.024.640	153.660.037.012	318.167.038.973	170.582.793.652	194.252.358.528	221.002.998.868
	<b>TOTAL BELANJA</b>	<b>591.434.443.791</b>	<b>665.602.474.009</b>	<b>931.077.983.938</b>	<b>682.331.174.609</b>	<b>747.124.455.878</b>	<b>818.529.625.438</b>
	<b>TOTAL PENDAPATAN</b>	<b>562.995.736.143</b>	<b>660.777.575.769</b>	<b>896.344.195.698</b>	<b>682.331.174.609</b>	<b>747.124.455.878</b>	<b>818.529.625.438</b>
	<b>SURPLUS/DEFISIT</b>	<b>(28.438.707.648)</b>	<b>(4.824.898.240)</b>	<b>(34.733.788.240)</b>	-	-	-

\*) APBD Kab. Nagan Raya Tahun 2014

\*\*) Berdasarkan RPJM Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2017

Pertumbuhan baik belanja tidak langsung maupun belanja langsung sejak tahun 2009 hingga tahun 2013 mengalami pertumbuhan rata-rata yang wajar terutama belanja tidak langsung mencapai 8,36%. Komposisi peningkatan pertumbuhan tertinggi dari item belanja tidak langsung adalah belanja bagi hasil kepada provinsi sebesar 736,69%. Untuk belanja pegawai pertumbuhannya sebesar 11,96%. Sementara belanja bantuan sosial meningkat sangat tinggi hingga sebesar 500,88%.

Untuk belanja langsung secara keseluruhan mengalami pertumbuhan rata-rata 17,08%, dengan komposisi pertumbuhan dari item belanja langsung adalah belanja pegawai sebesar 22,27%, belanja barang dan jasa sebesar 14,50% dan belanja modal sebesar 20,12%. Kedepan diharapkan belanja tidak langsung dapat meningkat secara bertahap dalam upaya pelaksanaan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

### 3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan anggaran untuk pembiayaan daerah dibagi atas dua bagian yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Penerimaan Pembiayaan dapat bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA) tahun anggaran 2013, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah.

Kebijakan Pembiayaan Daerah pada Tahun 2015 di Kabupaten Nagan Raya antara lain diarahkan untuk :

- a. Menjaga agar keuangan daerah tetap dalam kondisi surplus anggaran, dan jika terjadi defisit anggaran sedapat mungkin ditutup dengan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun lalu;
- b. Membentuk dana cadangan yang akan digunakan untuk kepentingan kepentingan yang sifatnya strategis, misalnya dana cadangan bencana alam; dan
- c. Mengembangkan investasi daerah dan penyertaan modal melalui transaksi dalam prinsip kehati-hatian (*prudential*).

**Tabel 3.12**  
**Realisasi dan Proyeksi/Target Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan**  
**Kabupaten Nagan Raya Tahun 2011 – 2015 (dalam Rupiah)**

No	Jenis Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Jumlah				
		Realisasi Tahun (2011)	Realisasi Tahun (2012)	Realisasi Tahun (2013)	Proyeksi/Target pada Tahun Rencana (2014)	Proyeksi/Target pada Tahun (2015)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3.1	Penerimaan pembiayaan	-	-	-	-	-
3.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)	40.850.707.079,03	29.438.707.648,25	25.437.126.166,69	36.733.788.240,00	33.486.442.686,00
3.1.2	Koreksi Penambahan Saldo Awal BLUD	-	-	-	-	-
	<b>JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>40.850.707.079,03</b>	<b>29.438.707.648,25</b>	<b>25.437.126.166,69</b>	<b>36.733.788.240,00</b>	<b>33.486.442.686,00</b>
3.2	Pengeluaran pembiayaan	-	-	-	-	-
3.2.1	Pembentukan dana cadangan	-	-	-	-	-
3.2.2	Penyertaan modal (Investasi) daerah	-	-	1.000.000.000,00	2.000.000.000	-
3.2.3	Pembayaran pokok utang	-	-	-	-	-
3.2.4	Pemberian pinjaman daerah	-	-	-	-	-
	<b>JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.000.000.000,00</b>	<b>2.000.000.000</b>	<b>-</b>
	<b>JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>40.850.707.079,03</b>	<b>29.438.707.648,25</b>	<b>24.437.126.166,69</b>	<b>34.733.788.240,00</b>	<b>33.486.442.686,00</b>

Sumber: DPPKAD Kabupaten Nagan Raya



